

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan biaya seseorang perlu bekerja. bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja pada orang lain. bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja pada Negara yang disebut dengan pegawai atau karyawan atau bekerja dengan orang lain disebut dengan pekerja atau buruh. seseorang yang bekerja untuk orang lain mengandung unsure adanya perintah upah dan waktu. disana ada hubungan kerja. Hubungan ini terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja dan sifatnya individual. dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat adanya hubungan kerja.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan “pekerja kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”<sup>1</sup>

Upah Minimum adalah standar minimal penghasilan yang dipandang layak untuk diperoleh seorang pekerja atau tenaga kerja. Bagi

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 5

seorang pekerja di perusahaan, upah minimum dilihat sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang diberikan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan dan disetujui bersama antara perusahaan dan karyawannya. Upah minimum dipandang sebagai imbalan minimal yang pantas atau layak didapat oleh seorang karyawan atas pekerjaannya. Dipandang pantas atau layak karena melalui upah tersebut dapat membiayai minimal kebutuhannya dalam satu bulan, atau agar yang bersangkutan memperoleh penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak konstitusional dari warga negara, karena diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Tepatnya Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :”*Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu berkaitan dengan berkaitan dengan upah (paling rendah) yang pantas atau layak diperoleh seorang karyawan, dengan pertimbangan upah tersebut dapat membiayai keperluan hidupnya sampai bulan berikutnya. Penentuan upah minimum ini biasanya ditentukan bagi seorang pekerja atas karyawan yang baru mulai bekerja. Dua hal yang diperlakukan mengawali seorang karyawan bekerja adalah hubungan kerja dan upah.

hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulis tetap menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, karena dalam Putusan yang menjadi dalam penelitsn ini, pasal dakwaannya masih menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Dalam Pasal 88 ayat (3). bahwa hubungan kerja adalah :hubungan dalam pekerjaan, yakni hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang berlandaskan pada suatu perjanjian kerja yang memiliki unsur upah, perintah dan pekerjaan. Menurut defenisi tersebut upah menjadi salah satu hal penting.suatu perjanjian kerja ,apabila seoarang yang kerja,dalam mengerjakan pekerjaannya tidak bermaksud untuk memperoleh upah.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia merupakan persoalan yang sering menjadi pembahasan.Perlindungan mengenai pemenuhan gaji terhadap karyawan merupakan isu yang tidak akan pernah ada ujungnya untuk diperdebatkan baik dari pihak swasta,pemerintah ataupun pihak manajemen pengertian upah menurut Pasal 1 ayat 30 uapah adalah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan .

Upah minimum merupakan suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang di tetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perauturan perundang-undangan serta di bayarkan atas

---

<sup>2</sup> Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah No 8 Tahun 1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral. Meskipun saat ini upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output seperti tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas.

Berdasarkan penelusuran beberapa putusan pengadilan, ditemukan adanya fakta, yang kemudian menjadi pelanggaran tindak pidana, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni membayar upah kepada karyawan lebih rendah dari upah minimum. Terhadap kasus – kasus tersebut kemudian diproses di Pengadilan. **Terhadap pelaku usaha/pengusaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dalam proses hukum didakwa dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

Pasal 185 :

Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan untuk tidak membayarkan upah pekerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum dapat dijatuhi sanksi pidana denda paling kecil Rp.100.000.000,00 dan paling besar Rp.400.000.000,00 atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lambat 4 (tahun)

Tentang ketentuan pemberian upah minimum tersebut, secara khusus diatur dalam Pasal 90 Ayat (1), yang berbunyi :

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 89 :

- 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
  - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
  - b. Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- 3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan provinsi dan/atau Bupati atau Walikota
- 4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 88 ayat (1) ::

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berkaitan dengan ketentuan diatas

fakta yang terjadi adalah banyak pekerja yang menerima atau masih ada pengusaha yang memberikan upah pada pekerja dibawah upah minimum,Sebagaimana data yang penulis peroleh pada putusan pengadilan yaitu pengadilan yang terdapat penulis sajikan pada table berikut ini.

TABEL .1

## PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEMBAYAR UPAH BAWAH UPAH MINIMUM

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor 1739/Pid.su s/2013/PN.j kt.pst.	MULYA SETIAWA N	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	<p>1. Menyatakan terdakwa MULYA SETIAWAN Bersalah melakukan tindak pidana” <b>membayar upah lebih rendah dari upah minimum</b> sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat {1}UU Nomor :13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan jo pasal 61 perda No:6 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan jo keputusan Gubernur No:167 tahun 2009 tentang upah minimum tahun 2010</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYA SETIAWAN dengan penjara selama 1{satu}tahun 3 {tiga} bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti</p> <p>1. berupa:1{satu}lembar slip gaji karyawan PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor .NIK:03.0399018 Atas nama AMIN,1{satu}lembar slip gaji karyawan PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor:Nik.01.0201068 atas nama M.YORDAN 1{satu}buah akte pengawasan ketenagakerjan.PT.baltic cotcp.ltd Nomor:1986 AP/W/26-K.2/1X/2000,2{Dua}lembar surat kepala dinas tenagakerja dan trasmigrasi No:4417/-1.836 tanggal 5 juli 2010 hal panggilan dinas,1{satu}berkas nota</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan perbuatan terdakwa MULYA SETIAWAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <b>pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum</b> .</p> <p>2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1{satu}tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 2{dua}tahun</p> <p>4. Menetapkan barang bukti</p> <p>3. berupa:1{satu}lembar slip gaji karyawan PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor .NIK:03.0399018 Atas nama AMIN,1{satu}lembar slip gaji karyawan PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor:Nik.01.0201068 atas nama M.YORDAN 1{satu}buah akte pengawasan ketenagakerjan.PT.baltic cotcp.ltd Nomor:1986 AP/W/26-K.2/1X/2000,2{Dua}lembar surat kepala dinas tenagakerja dan trasmigrasi No:4417/-1.836 tanggal 5 juli 2010 hal panggilan</p>	inkracht

				<p>pemeriksaan nomor:49/PKK/NP/-1.836-1 Tanggal 25 mei 2010,46{empat puluh enam}lembar slip gaji slip karyawan PT.balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah legalisir dan 1 {satu}lembar daftar karyawan PT.balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah dilegalisir .terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>Membebani agar terdakwa MULYA SETIWAN untuk membayar niaya perkara sebesar Rp.2.000,{dua ribu rupiah}</p> <p>2. Membebani agar terdakwa MULYA SETIWAN untuk membayar niaya perkara sebesar Rp.2.000,{dua ribu rupiah}</p>	<p>dinas,1 {satu}berkas nota pemeriksaan nomor:49/PKK/NP/-1.836-1 Tanggal 25 mei 2010,46{empat puluh enam}lembar slip gaji slip karyawan PT.balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah legalisir dan 1 {satu}lembar daftar karyawan PT.balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah dilegalisir .terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>Membebani agar terdakwa MULYA SETIWAN untuk membayar niaya perkara sebesar Rp.2.000,{dua ribu rupiah}</p> <p>5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000{dua ribu rupiah}</p>	
2	NOMOR 725/Pid.sus /2019/PN Tjk	SUKARDI bin RATIMAN H,	<p>Pasal 90 Ayat (1) Jo pasal 185 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SUKSRDI bin RATIMAN H,bersalah melakukan tindak pidana ”<b>telah membayar upah rendah dari upah minimum</b> berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota” sesuai pasal 90 ayat ( 1) jo pasal 185 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang krtenagakerjaan jo. Keputusan gubernur lampung nomor G/586/V.07/HK/2018;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKARDI bin RATIMAN H. selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) subside 6 bulan penjara;</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin RATIMAN H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>Telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum</b> berdasarkan Wilayah Provinsi atau kabupaten kota”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 bulan</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani.kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa</p>	Inkracht

			<p>3. menyatakan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota pemeriksaan 1 no. R.560/1980/F.07/01/02/2018 tanggal 30 mei 2018 surat dari pimpinan SPBU 24.351.112 (PT pratama prima sentosa) tanggal 4 juni 2018 prihaal tanggapan nota pemeriksaan,nota pemeriksaan 11 No. R.560/3056/V.07/01/02/2018 tanggal 2 juni 2018, copy rincian / rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa(SPBU 24.351.112) Bulan januari 2017 sampai dengan desember 2017, copy rincian /rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa (SPBU 24.351.112 priode januari s/d desember 2018, copy akta pendirian persesoan terbatas PT.pratama prima santosa No. 10 tanggal 04 mei 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth widyawati santosa ,SH, Copy akta pernyataan keputusan serkular para pemegang saham PT.pratama prima santosa No. 17 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Eizabeth widyawati santosa, SH, Copy surat izin gangguan (HO) Nomor :504.1/02222/30.17/ 111.27/1X/2016 Tanggal 14 september 2016, copy surat tanda daftar perusahaan (TDP) perseroan terbatas (PT)</li> </ul>	<p>percobaan 1(satu) tahun 5 bulan berakhir dan denda sebesar Rp.100.000,00.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan</p> <p>4. Menjatuhkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota pemeriksaan 1 no. R.560/1980/F.07/01/02/2018 tanggal 30 mei 2018 surat dari pimpinan SPBU 24.351.112 (PT pratama prima sentosa) tanggal 4 juni 2018 prihaal tanggapan nota pemeriksaan,nota pemeriksaan 11 No. R.560/3056/V.07/01/02/2018 tanggal 2 juni 2018, copy rincian / rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa(SPBU 24.351.112) Bulan januari 2017 sampai dengan desember 2017, copy rincian /rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa (SPBU 24.351.112 priode januari s/d desember 2018, copy akta pendirian persesoan terbatas PT.pratama prima santosa No. 10 tanggal 04 mei 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth widyawati santosa ,SH, Copy akta pernyataan keputusan serkular para pemegang saham PT.pratama prima</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Nomor: 07.01.6.46.03433 tanggal 14 September 2016 tetap terlampir dalam berkas</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah);</p>	<p>santosa No. 17 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Eizabeth widyawati santosa, SH, Copy surat izin gangguan (HO) Nomor :504.1/02222/30.17/ 111.27/1X/2016 Tanggal 14 september 2016, copy surat tanda daftar perusahaan (TDP) perseroan terbatas (PT) Nomor: 07.01.6.46.03433 tanggal 14 September 2016 tetap terlampir dalam berkas</p> <p>5. membebankan kepada terakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah)</p>	
3	NOMOR 1300/Pid.Sus/2011/PN .JktUt.	HENDRY KUMULIA	<p>Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</p>	<p>1. Menyatakan ia terdakwa HENRY KUMULIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) yakni pengusaha dilarang <b>membayar upah lebih rendah dari upah minimum</b> ditetapkan Oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Propinsi dan bupati /walikota yakni pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari uph minimum propinsi (UMP)Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.118.009 perbulan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia.No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 2 peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta no.165 tahun 2009 tentang upah minimum Propinsi DKI Jakarta .</p>	<p>M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan terdakwa HENDRY KUMULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <b>“MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM</b></p> <p>2. Menjatuhkan pidan oleh kerana itu kepada terdakwa HENDRY KUMULIA dengan pidana penjara selama :1(satu)tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah )dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka harus di ganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti Daftar gaji karyawan tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 25 Desember 2010,tanggal 26-11-</p>	inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRY KUMULIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000(seraus juta rupiah)subsida 3 (tiga)bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti: Daftar gaji karyawan tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 25 Desember 2010,tanggal 26-11-2010 sampai dengan 02 Desember 2010,tanggal 03 Desember 2010samapi dengan 19 Desember 2010,24 Desember 2010 sampai dengan 29 Desember 2010. - Daftar absensi Kayawan bulan Nopember dan desember 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. menetapkan supaya terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000( dua ribu rupiah)</p>	<p>2010 sampai dengan 02 Desember 2010,tanggal 03 Desember 2010samapi dengan 19 Desember 2010,24 Desember 2010 sampai dengan 29 Desember 2010. - Daftar absensi Kayawan bulan Nopember dan desember 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
4.	NOMOR 311/Pid.Sus /2018/PN Bil	YOHANNES HARTANTO	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	<p>1. Menyatakan terdakwa YOHANNES HARTANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana” <b>Membayar upah lebih rendah dari upah minimum</b> sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 185 ayat (1)jo .pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANNES HARTANTO dengan denda pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa YOHANES HARTANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>membayar upah lebih rendah dari pah minimum</b>”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYANNES HARTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,dengan denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut</p>	inkracht

			<p>Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan)</p> <p>3. Menyatakan barang bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(satu)bendel Nota pemeriksaan Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan transmigrasi kab.pasuruan.1(satu)bendel Nota peringatan II Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kerja tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.pasuruan, 1(satu) bendel Nota pemeriksaan III Nmor 566/1943/424.053/2016 tanggal 28 juli 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.Pasuruan, 1(satu)bendel peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 27 januari 2015 tentang persetujuan penangguhan dan penolakan penanggulan pelaksanaan Upah minimum kabupaten/kota di jawa Timur.</li> </ul> <p><b>Tetap Terlampir pada berkas perkara</b></p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah)</p>	<p>di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(satu)bendel Nota pemeriksaan Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan transmigrasi kab.pasuruan.1(satu)bendel Nota peringatan II Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kerja tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.pasuruan, 1(satu) bendel Nota pemeriksaan III Nmor 566/1943/424.053/2016 tanggal 28 juli 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.Pasuruan, 1(satu)bendel peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 27 januari 2015 tentang persetujuan penangguhan dan penolakan penanggulan pelaksanaan Upah minimum kabupaten/kota di jawa Timur.</li> </ul> <p><b>Tetap Terlampir pada berkas perkara</b></p> <p>4. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---	--	--

5.	Nomor 115/Pid.Sus /2019/PN.P wk.	TAN CHEE MUN	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa TAN CHEE MUN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KETENAGAKERJAAN” sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 185 ayat (1) UU RI No.13 tahun 2003 jo.pasal 90 ayat (1)dan ayat (2)tentang ketenagakerjaan</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CHEE MUN dengan pidana denda sebesar RP.100.000.000 (Seratus juta rupiah)subside 4 (empat) bulan kurungan</li> <li>3. Menetapkan barang bukti <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (dua)buah foto copy slip gaji karyawan 1(satu) lembar foto copy surat penolakan security 1(satu) lembar foto copy permohonan pencatatan SP 1(satu) lembar foto copy bukti pencatatan SP,1(satu) exemplar foto copy SKEP Gubernur Nomor:561/kep.1065-yanbangsos/2017 tentang upah minimum kabupaten/kota didaerah provinsi jawa barat tahun 2018,1(satu)buah buku tabungan Bank CIMB niaga kabupaten purwakarta an.JUMHADI,1 (satu) lembar foto copy keterangan domisili gangguan ,1(satu)lembar foto copy tanda daftar perusahaan,1(satu) lembar foto copy perjanjian tertulis an.JUMHADI tanggal 13 oktober 2017,1(satu)lembar foto copy pengajuan pencatatan perjanjian bersama kepada HI jabar tanggal 11 desember 2017 1(satu) ekssemplar foto copy pernyataan keputusan pemegang</li> </ol> </li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa TAN CHHE MUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KETENAGAKERJAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CHEE MUN dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000(se ratus juta rupiah )dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 2 (dua)buah foto copy slip gaji karyawan 1(satu) lembar foto copy surat penolakan security 1(satu) lembar foto copy permohonan pencatatan SP 1(satu) lembar foto copy bukti pencatatan SP,1(satu) exemplar foto copy SKEP Gubernur Nomor:561/kep.1065-yanbangsos/2017 tentang upah minimum kabupaten/kota didaerah provinsi jawa barat tahun 2018,1(satu)buah buku tabungan Bank CIMB niaga kabupaten purwakarta an.JUMHADI,1 (satu) lembar foto copy keterangan domisili gangguan ,1(satu)lembar foto copy tanda daftar perusahaan,1(satu) lembar foto copy perjanjian tertulis an.JUMHADI tanggal 13 oktober 2017,1(satu)lembar foto copy pengajuan pencatatan perjanjian bersama kepada HI jabar</li> </ol> </li> </ol>	inkracht
----	---	-----------------	---	--	---	----------

				<p>saham PT.WARENTY INDUSTRIES Nomor:166 tanggal 31 juli 2015,1(satu) eksemplar foto copy nota pemeriksaan 1 terhadap PT.WARERENTY INDUSTRIES Nomor:166 tanggal 31 2015, satu bundle foto copy akta pendirian PT.WARRENTY INDUSTRIES No. 42 tanggal 17 oktober 2006 (Di kembalikan kepada yang berhak)</p> <p>2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,00(dua ribu rupiah)</p>	<p>tanggal 11 desember 2017 1(satu) ekssemplar foto copy pernyataan keputusan pemegang saham PT.WARENTY INDUSTRIES Nomor:166 tanggal 31 juli 2015,1(satu) eksemplar foto copy nota pemeriksaan 1 terhadap PT.WARERENTY INDUSTRIES Nomor:166 tanggal 31 2015, satu bundle foto copy akta pendirian PT.WARRENTY INDUSTRIES No. 42 tanggal 17 oktober 2006 (Di kembalikan kepada yang berhak)</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

**Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung 2022**

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum?
2. Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa ppidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?

## **C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab pelanggaran pemberian upah di bawah upah minimum
- b. Untuk mengetahui alasan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa ppidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan teoritis

Lewat penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dilapangan hukum pidana materil maupun pidana formil, yang berkaitan dengan ketaatan pemberian upah yang sesuai dengan standar upah minimum.

Karena , jika memberikan upah dibawah atau lebih rendah dari upah minimum dalam kajian hukum pidana adalah sebuah tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan atau manfaat praktis dari penelitian ini adalah : memberikan efek jera bagi pengusaha yang selalu membuat pelanggaran tindak pidana, berupa membayar upah bagi karyawan dibawah upah minimum.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan fakultas Hukum Universitas Kritis Artha Wacana Penulis menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. **Nama** :Ardi F. Ludji

**Nim** :05310073

**Fakultas** : Hukum (UKAW)

**Judul:** kajian yuridis tentang penyebab pengusaha memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**Rumusan masalah:**

1) factor-faktor apakah yang menyebabkan banyak pengusaha memperkerjakan anak dibawah umur.

2. **Nama** : Ishak B.Ba'un

**Nim** :00310007

**Fakultas** :Hukum (UKAW)

**Judul :**

Deskripsi tentang pembayaran upah minimum Propinsi terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perseroan terbatas berdasarkan SK Gubernur Nomor 240/KEP/PH/2015 di Kota Kupang.

**Rumusan masalah:**

- 1) Mengapa pimpinan perseroan terbatas tidak membayar Upah Propinsi (UMP) sesuai SK Gubernur NTT NO. 240/KEP/HK/2015.

3. **Richard Febdinandi**

**Nim** :05310056

**Fakultas** :Hukum(UKAW)

**Judul** :Deskripsi tentang factor-faktor penyebab pimpinan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja serta akibat hukumnya berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang.

**Rumusan Masalah:**Faktor-Faktor Apakah yang menyebabkan Pimpinan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja serta akibat hukum?

4. **Wihelmina Tae Uskono**

**Nim:**15310165

**Fakultas** :Hukum(UKAW)

**Judul** :Kajian yuridis tentang putusan pengadilan terhadap pembayaran hak yang diterima pekerja/buruh setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Di pengadilan negeri kelas 1A Kupang

**Rumusan Masalah:** Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembayaran hak yang diterima pekerja/buruh setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Di pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?.

5. **Nama :Yermia R.Febriant**

**Nim :09310064**

**Fakultas :Hukum (UKAW)**

**Judul :** Analisis Terhadap perseroan terbatas yang tidak mendaftarkan jamsostek bagi pekerjanya menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kota kupang

**Rumusan masalah :**

- a. Mengapa perusahaan (perseroan terbatas) yang telah memnuhi syart wajib jamsostek tidak/ belum mendaftarkan pekerjaannya pada jamsostek?
- b. Bagaimana sanksi hukumnya?